



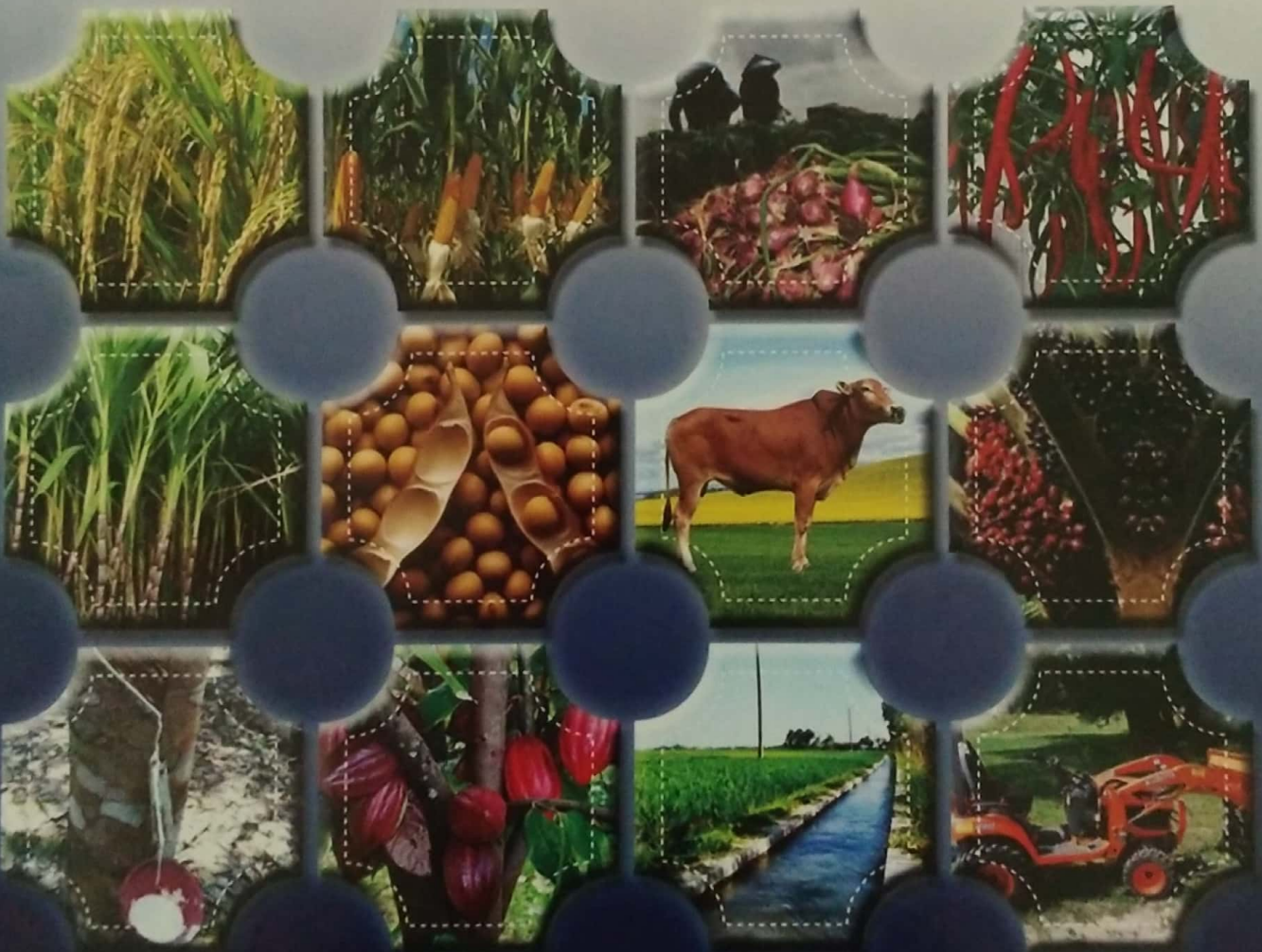
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

SELASA,
EDISI ;

25 JANUARI 2022
00226535/GBP/II/2022

KLIPING

Berita Pertanian



GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SELASA, 25 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. PERKEBUNAN :
 - DBH Kelapa Sawit Dieksekusi (BI)..... 1
 - PTPN XI Targetkan Giling Tebu 5,2 Juta Ton Tahun Ini (ID)..... 2
 - Pasokan Untuk Global Terjaga (BI)..... 3-4
2. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - DPR: Pupuk Subsidi Hanya Untuk Komoditas Pangan (KN)..... 5
 - Tuh, Mafia Pupuk Ternyata Ada Lho (RM)..... 6-7
 - Perubahan Iklim Tekan Produksi Beras (R)..... 8-9
3. KETAHANAN PANGAN :
 - Jatim Kerahkan Satgas Pangan (R)..... 10
 - Pemerintah Jamin Pedagang Pasar Tetap Bisa Untung (K)..... 11
 - Penyalur Dibuka Bagi Semua Pelaku Usaha (KN)..... 12
 - Migor Murah di Jual di Pasar Mulai Rabu (R)..... 13-14
4. PERTANIAN UMUM :
 - Anggaran Sektor Pertanian Terus Menyusut (ID)..... 15-16

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

- Subsidi Minyak Goreng (R)..... 17-18
- Mendorong Petani Naik Kelas (R)..... 19-20

oooooooo O ooooooooo

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 25/1/2022
☒ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 11
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

| PENGUATAN FISKAL DAERAH |

DBH Kelapa Sawit Dieksekusi

Bisnis, JAKARTA — Untuk pertama kalinya pemerintah akan mengenakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk perkebunan kelapa sawit sejalan dengan implementasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menteri Keuangan Sri Muliyani Indrawati menjelaskan adanya DBH untuk kelapa sawit ini ditujukan untuk menguatkan fiskal pemerintah daerah (pemda) yang menjadi penghasil komoditas tersebut.

"Ini bisa membantu infrastruktur di daerah produsen kelapa sawit, karena banyak yang infrastrukturnya rusak," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (24/1). bl. 11

Menkeu menambahkan saat ini pemerintah masih membahas secara internal

aturan teknis dari UU HKPD tersebut, termasuk peraturan pemerintah (PP) mengenai DBH kelapa sawit.

Sepanjang aturan turunan belum dirilis, kata Sri Muliyani, maka implementasi DBH masih menggunakan aturan yang selama ini berlaku. "Akan kami tingkatkan volume melalui DBH kelapa sawit. Aturannya sedang disusun," ujarnya.

Selama ini, pungutan untuk kelapa sawit dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Dalam rangka menyusun aturan teknis DBH kelapa sawit, Kementerian Keuangan juga berkonsultasi dengan BPD PKS selain Ditjen Bea Cukai.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan pemerintah juga terus berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun regulasi baru ini.

"Ini untuk melihat porsi mana dan mana yang bisa memberikan *sustainability*. Jadi jangan sampai kita memberikan DBH, tahun ini ada tahun berikutnya kosong," kata Prima.

Selain DBH kelapa sawit, PP lainnya yang sedang disiapkan oleh pemerintah antara lain tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dan PP tentang transfer ke daerah.

Selain itu juga aturan teknis mengenai pembiayaan utang dan sinergi pendanaan, PP tentang pengelolaan keuangan daerah, PP tentang sinergi kebijakan fiskal nasional, PP tentang tunjangan kinerja daerah, dan PP tentang retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit. (Tegar Arlefi)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 25/11/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

PTPN XI Targetkan Giling Tebu 5,2 Juta Ton Tahun Ini

SURABAYA – PT Perkebunan Nasional XI (PTPN XI) menargetkan giling tebu pada 2022 mencapai 5,2 juta ton, atau naik dari capaian 2021 sebesar 4,1 juta ton. Capaian PTPN XI pada 2021 sebesar 4,1 juta ton itu melampaui target sebesar 3,8 juta ton, dengan produksi gula sebesar 297 ribu ton atau naik dibanding realisasi 2020 yang sebesar 290 ribu ton.

Direktur PTPN XI R Tulus Panduwidjaja di Surabaya, belum lama ini, mengatakan, untuk mencapai target itu, pihaknya akan mengawal budidaya tebu serta menyukseskan transformasi EBITDA dan implementasi budaya *planters* ke seluruh karyawan. "Ke depan, untuk menuju swasembada gula juga diperlukan kerja sama serta kerja keras yang besar. Kami telah menyiapkan sumber daya yang dimiliki dengan target kualitas gula meningkat ke depannya," kata Tulus dalam siaran persnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani juga mengapresiasi capaian PTPN XI pada tahun giling 2021 dan berharap mampu meraih kesuksesan pada 2022. Abdul Ghani berharap PTPN XI mampu menjadikan salah satu industri gula terkuat pada 2022. "Saudara sekalian ditantang untuk membuktikan bahwa insan gula PTPN XI akan mampu mengembalikan kebanggaan yang seharusnya menjadi milik kita pada 2022, kebanggaan yang turut menjadi hak kita," ujar dia.

PTPN X juga menargetkan dapat menggiling tebu 4,25 juta ton dengan rendemen 7,88% serta produksi gula 340.375 ton pada 2022. Proyeksi itu naik 33% dibandingkan target 2021 yang mampu menggiling tebu sebanyak 3,55 juta ton dengan produksi gula 256.495 ton. Direktur PTPN X Tuha Bangun optimis mampu mencapai target itu, sebab tahun 2022 luas lahan tebu PTPN X mencapai 55.639 hektare (ha), atau naik 23,7% dari realisasi 2021. "Kami optimis dengan penambahan luas lahan ini, pasok bahan baku tebu (BBT) juga akan meningkat, tentunya diimbangi pengelolaan *onfarm* yang baik agar kualitasnya optimal," jelas Tuha.

PTPN X berencana memulai musim giling tahun 2022 pada Mei 2022 yang diawali di Pabrik Gula (PG) Gempolkrep dan PG Kremboong. "Sepanjang Januari-April ini, kami akan berfokus pada perawatan pabrik serta budidaya tebu secara optimal. Perawatan pabrik ini bertujuan mendukung peningkatan produksi gula dan meningkatkan efisiensi proses," kata Tuha. (tl/ant) 10/7

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PASOKAN UNTUK GLOBAL TERJAGA

Ilim Fathimah Timorria & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri minyak sawit menjamin pasokan ekspor komoditas itu tetap terjaga selama 6 bulan mendatang meskipun pemerintah menerapkan kebijakan larangan terbatas untuk penjualan ke luar negeri.

Pada 24 Januari 2022, Kementerian Perdagangan menerapkan larangan terbatas (lar-tas) ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), produk *refined, bleached, and deodorized* (RBD) *palm olein*, dan minyak jelantah sebagai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor.

Alhasil, persetujuan ekspor (PE) harus diperoleh untuk permohonan pemuatan barang ke luar negeri dengan syarat Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD *palm olein*, dan minyak jelantah untuk kebutuhan dalam negeri yang disertai dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka 6 bulan, dan rencana distribusi dalam jangka 6 bulan. 81.3

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan beleid itu tak banyak berpengaruh pada aktivitas ekspor maupun distribusi ke dalam negeri.

Sebanyak 32 anggota asosiasi telah berkomitmen menyediakan pasokan untuk konsumsi domestik.

"Kami perkirakan kebutuhan CPO untuk minyak goreng konsumsi domestik 4,8 juta ton untuk tahun ini. Pasokan kita masih tersisa banyak sekali. Tidak perlu ada kekhawatiran soal pasokan [ekspor]," katanya, Senin (24/1).

Dia tidak membantah terdapat potensi kenaikan konsumsi CPO pada 2022 dibandingkan dengan 2021 yang berkisar 3,9 juta–4,1 juta ton. Namun, Sahat mengingatkan bahwa mayoritas produk CPO dan olahan Indonesia diserap oleh pasar internasional, sehingga tidak perlu direspons negatif oleh pasar.

"Kebijakan ini justru dipelintir pasar, seolah Indonesia tidak bisa memasok karena ada regulasi. Tidak ada masalah pasokan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan."

Menurut dia, serapan domestik dari total produksi CPO Indonesia hanya sekitar 35%, dan selebihnya diserap oleh pasar ekspor. Dengan struktur serapan domestik yang kecil maka Indonesia tidak bisa menjadi penentu harga CPO global.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi menegaskan beleid baru pemerintah tidak akan berpengaruh pada kegiatan ekspor produk sawit

Indonesia.

Selain itu sebagian besar anggota asosiasi tersebut juga telah memasok bahan baku untuk kebutuhan domestik. "Saya kira tidak ada pengaruh dari ketentuan ini pada ekspor minyak sawit."

Dari produksi CPO dan minyak mentah kernel (CPKO) yang mencapai 51 juta ton pada 2020, Gapki mencatat ekspor dalam bentuk CPO hanya 7,17 juta ton dan RBD *palm oil* sekitar 21,1 juta ton. Hingga November 2021, eks-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 25/1/2022 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

por dalam bentuk CPO sebesar 2,43 juta ton dan RBD palm oil sebesar 23,45 juta ton.

Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi menilai kebijakan pencatatan untuk ekspor produk CPO, RBD palm olein, dan minyak jelantah bisa memengaruhi ekspor meski tak lantas menghambat pasokan ke luar negeri. Pemerintah sendiri tidak menetapkan volume yang wajib disalurkan produsen untuk konsumsi domestik.

"Saya kira kebijakan ini memang ditujukan untuk memengaruhi ekspor. Dalam arti, agar pasokan di dalam negeri dipastikan terse- dia," paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Aba-

di menyatakan pelepasan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter perlu diikuti kebijakan pembatasan pembelian.

Dengan maraknya aksi borong minyak goreng yang dilakukan konsumen, kata dia, menyebabkan stok minyak goreng kemasan di ritel modern berkurang drastis sejak pemerintah menerapkan kebijakan satu harga.

"Panic buying merupakan bentuk kesalahan strategi pemasaran pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Ini juga kegagalan pemerintah dalam membaca perilaku konsumen," tegasnya.

Tulus memperkirakan intervensi pemerintah di harga minyak tidak akan efektif, karena tak menyasar permasalahan utama. Dia men- duga ada praktik kartel dalam penetapan harga minyak goreng

di pasar dalam negeri.

YLKI lantas mendesak pemerin- tah untuk mengatur *domestic mar- ket obligation* dan patokan harga CPO untuk kebutuhan domestik. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar, jelasnya, Indonesia perlu mengatur hal tersebut.

Sementara itu, minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter dipastikan diterapkan di pasar tradisional pada pekan ini.

Kementerian Perdagangan me- laporkan kebijakan satu harga di pasar tradisional bisa dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan.

"*Inshaallah* implementasi sesuai target [sepekan setelah kebijakan dimulai 19 Januari 2022] atau 26 Januari 2022," kata Direktur Jen- deral Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan ketika dihubungi, Senin (24/1). ■

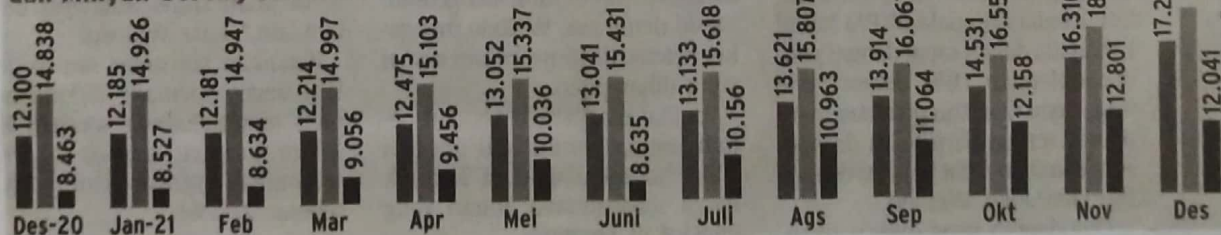


BISNIS/SINTA NOVIZAH

PANGGILAN UNTUK DOMESTIK

Saat ini ekspor produk CPO, RBD palm oil, dan minyak jelantah tidak bisa sembarangan. Paling tidak hingga enam bulan ke depan. Harus ada sederet syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir. Terpenting, jangan lupakan pasar domestik.

Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng Curah 2020-2021 (Rp/liter)



Sumber: BPPP Kemendag, diolah

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 25/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 19/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

■ PUPUK BERSUBSIDI

DPR: Pupuk Subsidi Hanya untuk Komoditas Pangan

JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menetapkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah soal kelanjutan program pupuk bersubsidi ke depan. Rekomendasi ini diharapkan bisa berjalan tahun 2022 ini.

Ketua Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono menjabarkan, rekomendasi ini antara lain. *Pertama*, pembatasan jenis komoditas pertanian yang menerima pupuk subsidi karena terbatasnya anggaran.

Saat ini, total ada 70 jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi.

Asal tahu saja, tahun 2022 ini, anggaran pupuk bersubsidi hanya Rp 25,3 triliun atau turun 13,06% dari tahun 2021 lalu yang mencapai Rp 29,1 triliun. Meski begitu, alokasi jumlah pupuk subsidi 2022 ini naik menjadi 9,11 juta ton dari tahun lalu 9,04 juta ton.

"Kami merekomendasikan agar pupuk bersubsidi dibatasi hanya untuk jenis komoditas prioritas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terha-

dap inflasi," ujar dia, Senin (24/1).

Kedua, pemerintah harus menyerahkan peta dan data spasial paling cepat pada Rapat Kerja DPR pada masa sidang berikutnya. Bila data ini tidak diberikan tepat waktu, maka Panja tidak merekomendasikan komoditas perkebunan memperoleh pupuk subsidi. **YN-14**

Ketiga, mengurangi jenis pupuk bersubsidi menjadi hanya jenis Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini sangat penting bagi peningkatan tanaman dan harganya relatif terjangkau oleh petani.

Keempat, menyesuaikan batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Adapun, saat ini batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah 2 hektare (ha).

Kelima. Untuk memperkuat pendistribusian pupuk bersubsidi, perlu ada perbaikan tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi.

"Kami minta BUMdes, koperasi, dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai

agen penyalur pupuk bersubsidi, serta pemerintah menambah anggaran untuk pengawasan pupuk bersubsidi ini," kata dia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, produksi pupuk bersubsidi ke depan yang menggunakan bahan baku impor bakal bermasalah. Pasalnya, China dikabarkan enggan melepas fosfat ke negara lain, termasuk Indonesia.

Fahriyadi

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Aparat Amankan 111,5 Ton Tuh, Mafia Pupuk Ternyata Ada Lho

Setua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Masyarakat jangan sungkan melapor ke aparat penegak hukum jika mengetahui ada pihak-pihak yang terlibat mafia pupuk.

"MASYARAKAT perlu terlibat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Jangan sampai mafia pupuk menyalurkan ke pihak lain dan mengambil keuntungan. Permainan harga pupuk mengganggu berbagai sektor kehidupan," tegas LaNyalla melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung upaya hukum Polres Nganjuk membongkar kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di sana sebanyak 111,5

ton. **RM. 7**

Kementan akan terus bekerja sama dengan Kepolisian menindak tegas oknum yang memainkan pupuk subsidi, serta menjamin kelancaran keterseediaan pupuk subsidi di tingkat petani.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Nganjuk. Pembongkaran dan penangkapan mafia pupuk subsidi di Nganjuk menjadi salah satu bukti dan jawaban dari masalah kelangkaan pupuk bersubsidi beberapa waktu terakhir," ujar Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Mohammad Hatta di Jakarta, kemarin.

Hatta menambahkan, tindakan nyata yang dilakukan Polres Nganjuk merupakan implementasi komitmen Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Dia memastikan, Mentan tidak akan memberi ruang kepada oknum yang menyalahgunakan pupuk subsidi atau menyengsarakan petani.

"Dalam kunjungan kerja di berbagai daerah, Pak Menteri

selalu meminta Kapolres, TNI dan Kejaksaan menindak tegas, menangkap siapa saja yang menyalahgunakan pupuk subsidi," ungkap dia.

Melanjutkan keterangannya, LaNyalla juga mengapresiasi keberhasilan Polres Nganjuk membongkar jaringan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Aparat penegak hukum kudu mengusut tuntas kasus tersebut serta meminta masyarakat agar tidak sungkan untuk melaporkan informasi tentang praktik mafia pupuk.

"Lapor ke aparat penegak hukum, jika melihat ada penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Semua wajib ikut mengawasi, agar subsidi pupuk benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan, di tengah musim tanam seperti sekarang," urai Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla meyakini, jaringan mafia pupuk masih banyak yang belum tertangkap, dan telah lama merusak hajat hidup orang banyak. Karenanya, dia juga mendorong Kementan dan produsen pupuk bersubsidi bekerja keras untuk menindak

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 25/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

tegas oknum-oknum yang terbukti terlibat.

"Jaringan mereka harus benar-benar disapu bersih. Kami mendukung aparat Kepolisian memberantas praktik mafia pupuk secara tuntas, mengungkap titik awal penyalahgunaan, memberi efek jera, hingga tidak ada lagi yang berani memainkan pupuk," jelasnya.

Diketahui, jajaran Polres Nganjuk menangkap tiga tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk.

"Para tersangka melakukan penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)," kata Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson dalam konferensi pers, Kamis (20/1).

Boy mengungkapkan, pada 6 Januari 2022 tim Polres Nganjuk mengamankan satu orang tersangka inisial R (51 tahun) pemilik kios yang menjual pupuk subsidi jenis urea

dan NPK Phonska tidak sesuai peruntukan di Kecamatan Tanjunganom. Dari gudang tersangka diamankan barang bukti sekitar 4 ton.

Setelah dilakukan pengembangan, lanjut dia, tim berhasil mengamankan tersangka HNP (23 tahun) saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton dari wilayah Kabupaten Ngawi untuk dibawa ke Nganjuk. ■ ONI

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Perubahan Iklim Tekan Produksi Beras

Harga pupuk nonsubsidi naik akibat lonjakan harga bahan baku impor.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi padi nasional pada 2022 sebanyak 55,2 juta ton. Target produksi tersebut mengalami stagnasi dibandingkan proyeksi terakhir capaian produksi padi 2021. Perubahan iklim secara ekstrem dinilai menjadi ancaman terberat untuk mempertahankan produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, upaya menjaga produksi pangan nasional pada tahun ini bakal dihadapkan pada tingginya tantangan terhadap anomali cuaca. Syahrul mengatakan, tantangan itu bukan hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga seluruh dunia yang menjadi produsen pangan.

"Perubahan iklim dan cuaca ekstrem akan berdampak tidak linier, tidak bisa diprediksi, dan tidak berkelanjutan," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (24/1). **R-10**

Di tengah ancaman perubahan iklim tersebut, Syahrul mengatakan, alokasi anggaran pemerintah untuk menjaga produksi padi nasional menurun. Pada lima tahun lalu, tersedia anggaran sekitar Rp 5 triliun dan kini hanya sekitar Rp 1,74 triliun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah pun mematok target yang realistis pada tahun ini.

Meski dengan target produksi yang stagnan, Syahrul mengatakan,

pada tahun lalu produksi padi cukup memenuhi kebutuhan nasional. Itu juga tecermin dari pergerakan harga sepanjang tahun yang relatif tidak mengalami lonjakan tinggi.

"(Sejak) dua tahun lalu kita tidak impor beras. Ini akan menjadi tahun ketiga kita tidak impor beras. Meski anggaran turun, kita terus dorong penggunaan KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujarnya.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, produksi padi tahun ini justru berpotensi mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Peluang peningkatan produksi seiring prediksi iklim tahun ini yang akan mengalami La Nina di awal musim tanam pertama.

"Berkaca dari dua tahun terakhir, saya optimistis kalau pemerintah bisa memanfaatkan momentum La Nina paling tidak produksi stagnan dibandingkan tahun lalu atau bahkan ada peluang untuk naik," kata Khudori.

Kementan menargetkan produksi padi atau gabah pada 2022 sekitar 34 juta ton beras. Khudori mengatakan, kenaikan produksi beras pada 2021 sekitar 1,14 persen dibandingkan 2020. Hal itu dicapai meski luas tanam dan panen turun. Data itu juga menandakan adanya peningkatan produktivitas padi. Menurut dia, iklim La Nina sangat mendukung peningkatan produksi karena memberikan kecukupan air ter-

utama di masa-masa kritis musim panen pertama periode Oktober-Maret.

"Tahun 2020 ada kemarau basah, lanjut 2021 masih ada La Nina. Tahun ini berdasarkan proyeksi BMKG masih ada La Nina sampai Februari kelanjutan dari tahun lalu," ujarnya.

Faktor lain yang menentukan, yakni terkait penyediaan dukungan produksi, khususnya pupuk. Khudori mengatakan, persoalan pupuk subsidi menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Sementara itu, untuk pupuk nonsubsidi, terus mengalami kenaikan harga hingga di luar batas kemampuan petani.

"Intinya ketika petani perlu, pupuk harus tersedia sekalipun yang nonsubsidi," katanya.

Harga pupuk

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, penyebab kenaikan harga pupuk nonsubsidi



Tahun ini berdasarkan proyeksi BMKG masih ada La Nina sampai Februari kelanjutan dari tahun lalu.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

saat ini akibat naiknya harga bahan baku impor. Syahrul mengatakan, salah satu bahan baku, seperti fosfat mengalami kenaikan harga hingga tiga kali lipat. Cina yang selama ini menjadi produsen bahkan sedang menyetop eksportnya.

"(Harga) pupuk di dunia naik dan sebentar lagi ini akan menjadi persoalan," kata Syahrul.

Menyikapi masalah harga tersebut, Syahrul mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memutuskan agar harga pupuk bersubsidi tidak naik. Namun, sebagai konsekuensi, harga pupuk nonsubsidi perlu penyesuaian dengan situasi pasar. Kementan juga akan terus mendampingi petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik.

"Tahun ini kami akan mengajarkan petani bagaimana pupuk berimbang," kata Syahrul.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, langkah Cina yang menyetop ekspor fosfat memiliki pengaruh besar terhadap situasi harga bahan baku secara internasional. Selain fosfat, bahan baku lainnya, seperti KCL juga naik tinggi sekitar tiga kali lipat.

Ia melanjutkan, harga pupuk nonsubsidi yang dijual oleh perseoran di dalam negeri masih lebih murah dibandingkan harga internasional. Dia menjelaskan, rata-rata harga pupuk di pasar ekspor kini mencapai Rp 14,5 juta per ton. Sementara itu, di Indonesia hanya dijual seharga Rp 9,3 juta per ton.

"Jadi, di dalam negeri harga pupuk lebih murah sekitar Rp 5 juta dibandingkan luar negeri," kata dia.

■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jatim Keraahkan Satgas Pangan

■ DADANG KURNIA

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengerahkan Satgas Pangan untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Satgas Pangan Jatim juga bakal mengecek keseragaman harga atas program minyak goreng murah, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 14 ribu per liter.

Khofifah pun menegaskan, keterlibatan Satgas Pangan Jatim sangat penting guna mengamankan rantai pasokan minyak goreng di wilayahnya. "Pastikan stoknya aman, karena negara telah menyiapkan dana subsidi dari biaya produksi minyak goreng ini," kata Khofifah di Surabaya, Senin (24/1).

Khofifah sebelumnya mengatakan, Pemprov Jatim belum lama ini telah menggelontorkan 75 ribu liter minyak goreng untuk operasi pasar di sejumlah daerah. Pemprov turut memberikan subsidi atas harga minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar. Minyak goreng operasi pasar dijual dengan harga Rp 12 ribu per liter.

Dia berharap, intervensi harga minyak goreng dari pemerintah pusat dapat menstabilkan harga jual minyak goreng bagi masyarakat umum. Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus memonitor dan mengevaluasi terkait efektivitas program tersebut di lapangan. **R 7**

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, jajarannya terus melakukan pemantauan stok minyak goreng satu harga di seluruh toko ritel modern. Berdasarkan hasil pemantauan, stok minyak goreng terpantau aman dengan harga tetap Rp 14 ribu per liter. "Makanya saya bingung di titik tertentu, ada yang menyampaikan sampai kehabisan, sampai langka," katanya.

Eri mengimbau masyarakat tak perlu panik dan cemas terhadap stok minyak goreng. Apalagi, Pemkot Surabaya juga menggelar operasi pasar

kebutuhan bahan pokok, termasuk komoditas minyak goreng. Operasi pasar digelar sejak 21 Januari hingga 28 Januari 2022.

Eri pun berpesan kepada masyarakat agar dapat menginformasikan jika masih menemukan adanya kelangkaan minyak goreng di wilayahnya. Informasi itu bisa disampaikan langsung ke lurah atau camat agar bisa ditindaklanjuti.

"Kalau ada satu daerah yang membutuhkan (minyak goreng) atau sempat habis begitu, tolong sampaikan kepada pak camat, sehingga kami bisa melakukan operasi pasar di lokasi," kata Eri.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos, memastikan operasi pasar telah digelar di sejumlah permukiman warga. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi kelangkaan ataupun adanya penimbunan minyak goreng. "Pak wali minta agar volumenya ditambah, baik dari sisi jumlah maupun luas wilayahnya," kata Yos.

Tak hanya menggelar operasi pasar, Yos juga mengaku telah melakukan sidak ke toko-toko ritel modern. Sidak dilakukan untuk memastikan mereka menjual harga minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan.

"Kami sidak di titik-titik mana harga minyak goreng yang masih tinggi. Bagian perekonomian dan Dinkopumdag kita bagi tim melakukan sidak ke berbagai tempat," katanya.

Apabila ditemukan toko ritel modern yang masih menjual minyak goreng dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi kepada pengelola atau pemilik. Sanksi tersebut dapat berupa pemanggilan, teguran surat peringatan (SP), hingga penutupan izin usaha. "Paling tidak teman-teman di lapangan bisa mengingatkan, karena ini dasarnya (harga) ada aturannya," kata dia.

■ edj satria kartika yudha

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

MINYAK GORENG

Pemerintah Jamin Pedagang Pasar Tetap Bisa Untung

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah baru akan menggelontorkan minyak goreng satu harga atau bersubsidi ke pasar tradisional per 26 Januari 2022. Pemerintah menjamin pedagang pasar tradisional tetap bisa meraih untung dengan menjual minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter itu. Ketentuan minyak goreng satu harga ini juga berlaku bagi para pedagang daring.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, minyak goreng satu harga bagi pasar rakyat atau tradisional akan digelontorkan oleh distributor mitra produsen minyak goreng mulai 26 Januari 2022. *14.10*

Minyak goreng dari produsen ditetapkan sampai ke distributor seharga Rp 12.500 per liter. Dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp 14.000 per liter, masih ada ruang keuntungan bagi distributor dan pedagang pasar.

"Jadi, masih ada ruang bagi pedagang pasar untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500 per liter hingga Rp 1.000 per liter. Keuntungan itu juga bergantung dari besaran margin yang diambil distributor," kata Oke ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Untuk penyediaan di pasar tradisional di daerah terpencil, lanjut Oke, distributor akan mendapat ganti biaya angkut atau pengiriman dari pemerintah. Sama seperti dana subsidi minyak goreng satu harga, dana penggantian biaya pengiriman

itu juga berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dialokasikan Rp 7,6 triliun.

"Bagi pedagang pasar yang sudah telanjur memiliki stok lama, mereka bisa meminta retur minyak goreng tersebut kepada distributor," ujarnya.

Sebelumnya, pedagang pasar tradisional dan pemilik warung bahan pokok mengeluhkan tak bisa menjual stok lama minyak goreng karena harga kulakan

Masih ada ruang bagi pedagang pasar untuk mendapatkan keuntungan.

Oke Nurwan

lebih tinggi ketimbang HET.

Kebijakan minyak goreng satu harga bersubsidi itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022. Pemerintah akan menyediakan 1,5 miliar liter minyak goreng selama enam bulan.

Sepekan terakhir, kebijakan minyak goreng satu harga ini sudah berjalan di toko dan gerai ritel modern. Selanjutnya akan digulirkan ke pasar-pasar tradisional. Sepekan bergulirnya kebijakan itu, harga minyak goreng di pasaran masih tinggi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 24 Ja-

nuari 2022, harga rata-rata nasional minyak goreng curah, kesaat ini, JDID belum mem-

masan bermerek 1, dan kema-berlakukan kebijakan harga mi-
san bermerek 2 masih tinggi, nyak goreng sawit Rp 14.000
kendati mulai turun. Minyak per liter. JDID masih menung-
goreng bermerek 2 atau ke-
gu instruksi/arahan dari peme-
masan sederhana yang pekan
rintah terkait hal ini.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

Head of Public Policy and
Government Relations To-
menjadi Rp 22.450 per kg atau kope-
dia Hilmi Adrianto menga-
takan, Tokopedia juga sedang
mempelajari kebijakan minyak
sederhana dan premium, nya
terkait mekanisme pene-
juga berlaku bukan hanya di
ritel modern dan pasar rakyat,
tersebut di lokapasar.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 14 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

MINYAK GORENG SUBSIDI

Penyalur Dibuka bagi Semua Pelaku Usaha

JAKARTA. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Beleid ini diteken oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022 pekan lalu dan berlaku sejak diundangkan 19 Januari 2022 hingga enam bulan ke depan. Tujuan aturan ini adalah untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di pasaran yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.

Aturan ini menyatakan, pelaku usaha yang ingin ikut dalam penyediaan kebutuhan minyak goreng kemasan bersubsidi bagi masyarakat harus mendaftar kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. *KN-14*

Setelah Kementerian Perdagangan (Kemdag) memverifikasi produsen, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan menyampaikan

penetapan pelaku usaha dimaksud kepada Direktur Utama BPDPKS. Selanjutnya pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh Kemdag akan melakukan perjanjian pembiayaan penyediaan minyak goreng bersubsidi dengan Direktur Utama BPDPKS.

Kewajiban mereka adalah menyediakan minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 14.000 per liter bagi masyarakat termasuk UMKM. Mereka juga bertanggung jawab mendistribusikan minyak goreng hingga tingkat pengecer.

Pelaku usaha dapat mengajukan dana pembiayaan kepada BPDPKS berdasarkan selisih antara HET dengan Harga Acuan Keekonomian minyak goreng kemasan dari pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyaman Ranamanggala melihat ada empat produsen minyak goreng besar yang bisa mengatur produksi dan harga minyak goreng di pasaran dalam negeri. "Mereka punya *market power*," katanya.

Syamsul Ashar, Achmad J

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Migor Murah Dijual di Pasar Mulai Rabu

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Kebijakan minyak goreng (migor) satu harga sebesar Rp 14 ribu per liter akan diterapkan di pasar tradisional pada pekan ini. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyam-paikan, para pedagang dapat berkoordinasi lang-sung dengan para penyuplai untuk bisa men-dapatkan pasokan minyak goreng murah.

Program minyak goreng satu harga mulai dijalankan pemerintah sejak Rabu (19/1) di seluruh toko ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Penerapan dimulai dari ritel modern karena pemerintah menilai pembukuan admi-nistrasinya lebih mudah di-bandingkan pasar tradision-al. 12-1

"Rencananya, (minyak goreng satu harga di pasar tradisional) mulai Rabu pe-kan ini," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada *Republika*, Senin (24/1).

Pada tahap awal, kata Oke, pedagang pasar bisa berbicara dengan pihak distributor untuk menjual minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter dari stok yang sudah ada sebelum prog-ram subsidi digulirkan. Menurut dia, hal itu juga sekaligus untuk mendapatkan pasokan produk

minyak goreng dengan harga yang sudah disubsidi pemerin-tah.

Direktur Bahan Pokok dan Penting Kemendag Isy Karim mengatakan, pihak-pihak ter-kait, seperti asosiasi, akan dili-batkan dalam memperluas prog-ram minyak goreng satu harga

di pasar tradisional. Pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat penyaluran mi-nyak goreng satu harga.

Minyak goreng satu harga terus diburu masyarakat. Berda-sarkan laporan dari berbagai daerah, stok minyak goreng di *minimarket* habis dalam hi-tungan jam setiap harinya. Pada Ahad (23/1), Aprindo menyebut stok minyak goreng di toko ritel modern makin menipis. Menu-rut Ketua Umum Aprindo Roy Mandey, distribusi dari pihak produsen tidak lancar.

Isy mengatakan, Kemendag akan segera menindaklanjuti ke-luhan Aprindo mengenai pa-sokan minyak goreng. "Rencana-nya, Selasa ini akan dikumpul-kan kembali para produsen minyak goreng," kata Isy.

Ketua Umum Asosiasi Ped-a-gang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono, mengata-kan, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengenai perluasan mi-nyak goreng satu harga ke pasar tradisional. Ia mengatakan, APPSI siap membantu, siap dili-batkan, dan siap melaksanakan distribusi minyak goreng.

Ia mengatakan, APPSI juga telah menyiapkan diri dengan sistem dan mekanisme distribusi terkontrol. "Jadi, nanti tinggal ke mana pedagang pasar harus ber-belanja minyak goreng di bawah Rp 14 ribu per liter sehingga harga jual ke konsumen bisa Rp 14 ribu per liter," kata dia.

Menurut Sudaryono, peda-gang pasar semestinya sejak awal dilibatkan dalam program minyak goreng satu harga. "Pembinaan pedagang pasar adalah tugas pemerintah, maka seharusnya dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan

dengan perdagangan di pasar."

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perila-ku *panic buying* minyak goreng oleh masyarakat merupakan dampak dari kurang tepatnya strategi pemerintah dalam mem-buat kebijakan publik. Dari kaca-mata konsumen, kata Tulus, perilaku *panic buying* meru-pakan fenomena yang anomali dan sifat yang cenderung egois dan mementingkan kepenting-annya sendiri. "Ini menjadi ke-gagalan pemerintah dalam mem-baca perilaku konsumsien di In-donesia," kata Tulus dalam kete-rangan tertulisnya, Senin (24/1).

YLKI turut menyoroti pa-sokan minyak goreng murah di toko ritel modern yang makin menipis seperti yang diungkap Ketua Umum Aprindo Roy Man-dey. Tulus mengatakan, pemerin-tah seharusnya membatasi jum-lah pembelian, misalnya setiap

BERITA TERKAIT

Jatim Kerahkan Satgas Pangan

Hlm-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

konsumen hanya boleh membeli minyak goreng sebanyak 1 liter.

Dalam menjual minyak goreng satu harga, toko ritel modern memang membatasi pembelian. Namun, kebijakannya tak seragam. Ada yang membatasi pembelian sebanyak 2 liter, ada juga yang 1 liter.

Tulus menilai intervensi pemerintah melalui kebijakan minyak goreng satu harga tidak efektif karena strategi yang dijalankan tidak tepat. "Ini tidak menemuk pada hulu persoalan yang sebenarnya, yakni adanya dugaan praktik kartel di pasar minyak goreng," ujar dia.

Ucapan Tulus itu merujuk pada pernyataan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU pada pertengahan pekan lalu menyebut ada kemungkinan praktik kartel dalam fenomena kenaikan harga minyak goreng dalam negeri. Meski begitu, KPPU menyampaikan, dugaan itu masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pemerintah daerah mencoba memastikan ketersediaan mi-

nyak goreng murah di wilayahnya masing-masing. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan minyak goreng secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, ia meminta warga DKI Jakarta untuk tidak khawatir dengan ketersediaan minyak goreng. "Kami pastikan ketersediaan," kata Riza ketika ditemui di Balai Kota DKI, Senin (24/1).

Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza mengatakan, pihaknya telah menyiapkan minyak goreng satu harga. Menurut dia, merek yang tersedia untuk dijual dengan harga tersebut sama dengan yang biasanya dijual di toko lain, seperti Filma, Tropical, Food Stasion, dan Gurih.

"Mencegah *panic buying*, maka di seluruh gerai kami lakukan pembatasan penjualan satu pembeli maksimal 2 liter minyak goreng," kata Gatra.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng juga mengimbau

warga tidak melakukan aksi borong dan menimbun minyak goreng murah. "Harga minyak goreng yang disubsidi pemerintah ini akan terus bertahan hingga beberapa bulan ke depan sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan harganya kembali naik," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulteng Doni Iwan Setiawan, kemarin. Menurut dia, meski ada pembatasan pembelian minyak goreng kemasan, celah masyarakat melakukan penimbunan terbuka lebar.

Ia menceritakan, pada hari pertama penerapan kebijakan penyeragaman harga minyak goreng, antusiasme masyarakat sangat tinggi, bahkan hingga berebutan karena *panic buying*. "Tapi, memasuki hari kedua dan ketiga hingga seterusnya, antusiasme masyarakat sudah menurun dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan *panic buying*," kata Doni.

■ antara ed: satria kartika yudha

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Anggaran Sektor Pertanian Terus Menyusut

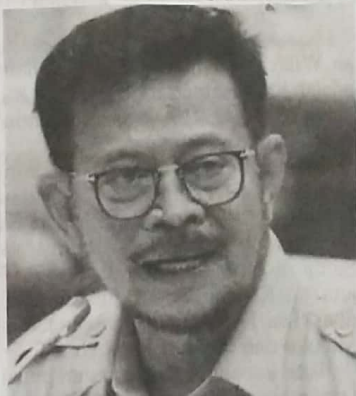
JAKARTA – Anggaran sektor pertanian yang dikelola Kementerian Pertanian (Kementan) terus menunjukkan tren penyusutan. Pada 2017, anggaran pertanian masih Rp 24,23 triliun, namun pada 2021 hanya Rp 16,31 triliun, bahkan pada 2022 hanya dialokasikan Rp 14,45 triliun. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementan mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani di Tanah Air sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga.

Oleh Ridho Syukra 19-7

Dalam data yang dipublikasikan Kementan, anggaran pertanian pada 2017 mencapai Rp 24,23 triliun dengan realisasi (penyerapan) Rp 21,91 triliun (90,44%), pada 2018 sebesar Rp 24,04 triliun dengan realisasi Rp 21,84 triliun (90,84%), dan pada 2019 mencapai Rp 21,83 triliun dengan realisasi Rp 19,42 triliun (88,97%). Lalu, pada 2020 sebesar 15,89 triliun dengan realisasi Rp 15,12 triliun (95,21%), dan pada 2021 sebesar Rp 16,31 triliun dengan realisasi Rp 15,87 triliun (97,28%).

Pada 2022, anggaran Kementan hanya Rp 14,45 triliun, tapi Kementan tetap diminta Kementerian Keuangan untuk melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp 680,49 miliar guna mengantisipasi ketidakpastian akibat Covid-19 tahun ini. Kementan memasang target produksi komoditas utama padi 55,2 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2022, jagung 20,1 juta ton, kedelai 0,2 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, bawang putih 91 ribu ton, kakao 780.900 ton, kopi 795.450 ton, kelapa 2,86 juta ton, gula tebu 2,3 juta ton, dan daging sapi/kerbau 444.550 ton.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sektor pertanian menghadapi sejumlah tantangan berat tahun ini, salah satunya keterbatasan anggaran. Dalam lima tahun terakhir,



Syahrul Yasin Limpo

anggaran Kementan terus menunjukkan tren penurunan. "Anggaran Ditjen Tanaman Pangan lima tahun lalu misalnya, itu masih Rp 5 triliun, tapi terus turun menjadi Rp 3 triliun, menjadi Rp 2 triliun, dan kini menjadi Rp 1,74 triliun. Ini tantangan luar biasa di saat kita juga tengah menghadapi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Karena itulah, kami terus mengakselerasi KUR guna menutupi terus turunnya anggaran tersebut," kata Mentan Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang dipantau di Jakarta, Senin (24/1).

Pada 2021, realisasi serapan KUR sektor pertanian mencapai Rp 85,62 triliun atau 122,31% dari target atau plafon Rp 70 triliun. Rinciannya, realisasi KUR pangan Rp 23,03 triliun (85,88% dari target), KUR hortikultura

Rp 10,67 triliun (136,01%), KUR perkebunan Rp 29,74 triliun (146,64%), KUR peternakan Rp 15,54 triliun (103,18%), KUR kombinasi Rp 5,58 triliun, dan KUR jasa Rp 1,05 triliun. Tahun ini, Kementan mengharapkan plafon untuk KUR pertanian bisa mencapai Rp 90 triliun.

Selain penurunan anggaran, tantangan berat lain tahun ini adalah perubahan iklim (*climate change*). Kemampuan Kementan dalam melakukan adaptasi dan mitigasi haruslah teruji. Salah satu dampak perubahan iklim adalah cuaca ekstrem yang tahun ini secara global diprediksi tanpa terduga akan menghantam seluruh dunia. Kondisi cuaca yang demikian

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

“

Tahun ini, sektor pertanian juga menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim adalah cuaca ekstrem yang bisa menghambat peningkatan produktivitas pangan.

menjadi hambatan luar biasa dalam peningkatan produktivitas pangan. “Cuaca yang demikian membuat produksi pertanian kemungkinan tidak linier, *unpredictable*, dan *uncontinued*,” jelas Mentan.

Terkait itu, Mentan telah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mendapatkan relaksasi dalam pengalihan Balitbangtan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mentan mengatakan, relaksasi pengalihan itu menjadi sangat penting karena Indonesia sejatinya tidak boleh berspekulasi dalam menghadapi perubahan iklim. Meningkatnya kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi global yang berkontraksi tidak jelas dan tidak pasti, tentu harus menjadi perhatian. “Menghadapi perubahan iklim butuh varietas tanaman tertentu,

butuh varietas tahan air dan varietas yang mampu menghadapi kemungkinan air yang hilang. Jangan sampai ini terjadi di tengah anggaran Kementan yang terus turun. Karena itu, peralihan Balitbangtan butuh perhatian serius,” ungkap Mentan.

Capaian 2021

Pada 2021, capaian kinerja sektor pertanian cukup menggembirakan yang tercermin dari sejumlah indikator makro ekonomi. Nilai ekspor pertanian pada 2021 misalnya, mencapai Rp 625,04 triliun atau naik 38,69% dari 2020 yang hanya Rp 451,77 triliun. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2021 mencapai 108,34 atau naik 1,08% dari November 2021 yang mencapai 107,18. Dua tahun lalu, NTP hanya 99,47 bahkan pada Renstra Kementan untuk 2024 ditetapkan 105. “Produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian konsisten tumbuh positif sejak 2020 hingga 2021, pada triwulan I-2021, PDB pertanian tumbuh 2,95% (tahunan) dan pada triwulan III-2021 masih tumbuh 1,31% (tahunan),” kata Mentan.

Sementara realisasi produksi pangan utama padi pada 2021 sebesar 55,27 juta ton GKG (naik 1,13% dari 2020), jagung 23,04 juta ton (0,52%), bawang merah 1,93 juta ton (6,63%), kakao 750 ribu ton (1,25%), kopi 775 ribu ton (1,71%), gula tebu 2,42 juta ton (13,62%), daging ayam ras 3,42 juta ton (6,5%). Namun, produksi cabai, kelapa, dan daging sapi/kerbau mengalami penurunan meski tidak signifikan. “Dengan anggaran yang ada, kami berhasil melakukan kegiatan sesuai target. Pengembangan kawasan padi terealisasi 103,26% dari target 1,9 juta ha, kawasan jagung terealisasi 106,92% dari target 1,4 juta ha, dan kawasan bawang merah terealisasi 100% dari target 3.241 ha,” jelas Mentan. (d)

2

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Berita Foto |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Tajuk |
| | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Subsidi Minyak Goreng

KHUDORI, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayagunaan Pertanian

Jika mekanismenya terbuka seperti penyaluran subsidi elpiji "gas melon" 3 kg, "subsidi" minyak goreng dipastikan melenceng.

Pemerintah meracik dua kebijakan untuk menstabilkan dan menurunkan harga minyak goreng. Pertama, memberlakukan minyak goreng satu harga. Seluruh minyak goreng berbasis sawit, baik kemasan premium maupun sederhana, merek yang menyasar kelas atas ataupun pasar massal, dijual dengan harga sama, Rp 14 ribu per liter.

Ini berlaku di ritel modern pada 19 Januari 2022, sepekan kemudian di pasar tradisional. Minyak goreng sebanyak 1,5 miliar liter dipasok selama enam bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

Kedua, pengeksportir minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*/CPO), *refined bleached and deodorized palm olein* (RBD Palm Olein), dan *used cooking oil*, wajib melaporkan pemenuhan kebutuhan domestik guna mendapat persetujuan ekspor.

Pengeksportir harus melampirkan kontrak penjualan, rencana ekspor, dan distribusi ke dalam negeri selama enam bulan. Pemerintah mengklaim, ini bukan kewajiban memenuhi pasar dalam negeri (*domestic market obligation*/DMO). **R. S**

Sebab, kebijakan ini tak menentukan kuota dan harga patokan di dalam negeri. Kebijakan pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Kebijakan pertama tak tercapai jika kepastian pasokan minyak goreng dalam negeri tak bisa dijamin.

Sebaliknya, kebijakan kedua tak berguna jika harga minyak goreng tetap tinggi seperti

lima bulan terakhir, antara Rp 19 ribu-Rp 21 ribu per liter.

Agar harga terjangkau, selisih harga keekonomian minyak goreng kemasan sederhana dan premium (Rp 17 ribu per liter) dengan harga eceran tertinggi (Rp 14 ribu per liter) ditutup dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 7,6 triliun.

Dana BPDPKS dihimpun dari pelaku usaha perkelapasawitan nasional, merujuk Pasal 93 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebut *CPO Supporting Fund* (CSF). Dana dihimpun baik dari pelaku swasta, BUMN, maupun petani.

Dana digunakan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Caranya, mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, *replanting*, peningkatan jumlah mitra usaha dan penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat ihwal perkebunan sawit.

Karena dipungut dari pelaku industri dan dikelola dari dan untuk industri sawit, tidak pada tempatnya pemerintah mengklaim pembayaran selisih harga keekonomian dan HET minyak goreng sebesar Rp 3.000 per liter sebagai subsidi.

Dana itu bukan dari kantong pemerintah. Juga bukan dari APBN. Dana yang dikelola BPDPKS ini sebagian ada andil petani sawit. Karena itu, pada tempatnya memperta-



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 25/1/2012 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

nyakan siapa sebenarnya penerima manfaat dan penanggung beban "subsidi" ini?

Penjelasan atas pertanyaan ini penting agar publik mendapatkan pemahaman utuh, jernih, dan menghindarkan klaim sepihak.

Jika mekanismenya terbuka seperti penyaluran subsidi elpiji "gas melon" 3 kg, "subsidi" minyak goreng dipastikan melencong. Dengan mekanisme ini, semua orang dari yang miskin hingga superkaya bebas mengakses minyak goreng Rp 14 ribu per liter.

Apakah ini adil? Bukankah hakikat subsidi hanya diberikan kepada yang membutuhkan? Berikutnya, bagaimana mengawasi agar minyak goreng tidak dijual ke pasar dunia? Dengan harga CPO saat ini, harga minyak goreng berbasis sawit di pasar dunia setara Rp 25 ribu per liter.

Ada disparitas harga cukup tinggi antara harga di pasar dunia dan harga domestik, yang mendorong perilaku *moral hazard*.

Lalu, bagaimana mencegah minyak goreng "subsidi" tak dioplos minyak goreng lain lalu dijual dengan harga di pasar tradisional Rp 19 ribu-Rp 20 ribu per liter. Modus oplos ini terjadi pada "gas melon" dan amat mungkin ditiru di minyak goreng.

Terakhir, bagaimana mengawasi agar tak terjadi penimbunan atau *kongkalikong* pemilik toko sebagai operator dengan pabrik minyak goreng? Praktik menimbun kecil-kecilan ditemukan di sejumlah daerah.

Sementara modus *kongkalikong* belum tampak gejalanya karena sulit diawasi. Bukan mustahil terjadi praktik pedagang menggunakan sederet nama toko untuk membeli minyak goreng subsidi untuk dikirim ke gudang tertentu.

Truk minyak goreng mondar-mandir dari gudang ke pabrik. Dengan cara ini, pedagang bisa untung Rp 3.000 per liter potong ongkos angkut. Pabrik bisa meraup Rp 5.000 per liter dipotong Rp 3.000 per liter untuk pemilik gudang sebagai operator.

Sampai di sini, tampak penerima manfaat "subsidi" minyak goreng bukan pihak yang seharusnya menerima, yakni warga miskin, mereka yang rentan atau pelaku usaha kecil. Penikmat "subsidi" terbesar mereka yang berpunya.

Sebaliknya, untuk kesekian kalinya, petani menjadi salah satu penanggung beban bagi industri dan kaum berpunya. Kebijakan ini selain tidak bijak, juga tidak adil. ■

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mendorong Petani Naik Kelas

Petrokimia menggandeng 21.344 petani dalam Program Makmur, PT Royal Lestari Utama (RLU) membina petani karet di Jambi.



■ NOVITA INTAN

Salah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta adalah membina petani. Hal itu bertujuan agar para petani dapat mengelola lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan, kemudian naik kelas. Hal itu dilakukan antara lain oleh Petrokimia Gresik dan PT Royal Lestari Utama (RLU).

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota *holding* Pupuk Indonesia, telah menggandeng 21.344 petani dalam Program Makmur sepanjang tahun

2021 dengan luas lahan yang digarap mencapai 19.421 hektare (Ha) atau 121 persen dari target yang diamanahkan yaitu 16 ribu Ha.

Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik Digna Jatningsih menjelaskan, Program Makmur yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan dijalankan oleh seluruh anggota *holding*, termasuk Petrokimia Gresik, merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani dari hulu hingga hilir sehingga proses budi daya maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal.

"Program ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian di berbagai komoditas yang kami

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 15 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

garap, mulai dari tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura," ujar Digna, beberapa waktu lalu.

Adapun Program Makmur yang dijalankan Petrokimia Gresik selama tahun 2021 menasar komoditas padi (seluas 7.781 Ha), tebu (5.728 Ha), jagung (4.292 Ha), kelapa sawit (948 Ha), benih kangkung (532 Ha), bawang merah (50 Ha), tembakau (50 Ha), porang (35 Ha), dan melon (5 Ha).

"Mayoritas di Jawa Timur yang merupakan wilayah terdekat dengan perusahaan. Kemudian Jawa Tengah dan DIY, disusul Bali-Nusra, Jawa Barat, serta Sumatra," tambah Digna.

Melalui program tersebut, Petrokimia Gresik memberikan jaminan pasar dengan menghadirkan *offtaker* untuk menjaga harga hasil pertanian tidak anjlok bila dijual ke tengkulak, kemudian menggandeng pihak asuransi untuk melindungi petani dari potensi gagal panen, serta bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai pemberi modal. Petrokimia Gresik akan berperan dalam menyuplai pupuk dan pestisida melalui anak perusahaan sekaligus memberikan kawalan melalui edukasi pemupukan berimbang dan layanan mobil uji tanah.

"Ketika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap dengan baik, diharapkan kesejahteraan petani dapat terdorong dan tentunya stok pangan nasional juga terjaga," tandasnya.

Digna menambahkan, Program Makmur juga menjadi sarana edukasi bagi Petrokimia Gresik agar petani terbiasa menggunakan pupuk nonsubsidi, mengingat alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Sebagai bonusnya, penjualan pupuk nonsubsidi Petrokimia Gresik pun meningkat.

Tahun 2021, serapan NPK nonsubsidi dari Program Makmur mencapai 9.56 ton atau 201 persen dari target sebesar 4.800 ton, dan serapan urea nonsubsidi sebanyak 3.812 ton atau 119 persen dari target 3.200 ton. Selain itu juga adanya serapan pupuk nonsubsidi ZA sebanyak 16.383 ton, SP-36 berjumlah 390 ton dan ZK 46 ton. Adapun total penjualan pupuk komersial atau nonsubsidi dari Program Makmur Petrokimia Gresik mencapai 29.585 ton.

Kendati demikian, ada sejumlah kendala yang dihadapi Petrokimia Gresik dalam menjalankan Program Makmur. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga administrasi dan lapangan yang memiliki kualifikasi agronomis untuk kawalan lapangan.

"Untuk itu, kami mengadakan sejumlah *workshop* sebagai jawaban atas permasalahan tersebut untuk memastikan kawalan lapangan Program Makmur berjalan optimal," ujar Digna.

Pembinaan petani karet

Ratusan petani karet yang tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH) dan kelompok wanita tani (KWT) di Desa Sungai Karang, VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, mendapatkan pembinaan. Kegiatan pembinaan yang digelar

sejak Oktober 2021 itu dilaksanakan agar para petani dapat mengelola lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan petani karet ini dihelat perusahaan karet alam berkelanjutan, PT Royal Lestari Utama (RLU), melalui anak usahanya PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wisesa dengan menggandeng Yayasan Inisiasi Dagang Hijau (IDH). Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rejo Mulyo Lestari, Miswandi, mengatakan, pembinaan yang diberikan RLU dan IDH ini sangat bermanfaat untuk petani.

Tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai budi daya tanaman yang lebih produktif dan berkelanjutan, petani juga mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian. Bantuan berupa pisau sadap, mangkuk untuk menampung getah karet, dan bibit tanaman karet unggul.

"Pelatihan ini sangat baik dan menambah pengetahuan kami tentang KTH dan tujuan dari kemitraan kehutanan yang membuat kami semakin semangat dalam mem-

bangun kelompok," ujar Miswandi. "Kami berharap ke depan mendapatkan bimbingan dalam menyusun dan membuat rencana bisnis."

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Karang Jaya, Nurwati, mengatakan, pelatihan yang diberikan membuat petani memiliki wawasan yang lebih luas mengenai teknik budi daya tanaman dan pemanfaatan lahan. "Kami sangat senang dengan pelatihan ini karena dapat menambah wawasan tentang pentingnya berwirausaha dan bagaimana cara memanfaatkan lahan di sekitar rumah," katanya.

Direktur RLU Yasmine Sagita menjelaskan rangkaian pelatihan untuk petani yang tergabung dalam KTH dan KWT ini diisi oleh fasilitator yang berkompeten. Fasilitator tersebut datang dari kalangan akademisi Universitas Jambi serta kalangan profesional di bidang teknik budi daya tanaman karet dan penerapan agroforestri (wanatani) karet.

"Kegiatan ini di antaranya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani maupun fasilitator perusahaan tentang bagaimana teknik budi daya tanaman karet dan praktik manajemen terbaik pengelolaan lahan berkelanjutan," ucap Yasmine Sagita.

Teknik budi daya yang diberikan meliputi penyiapan lahan, budi daya tanaman, serta pengenalan dan cara penanganan penyakit tanaman. Petani juga dikenalkan dengan pengelolaan tanaman karet dengan prinsip keberlanjutan serta cara memilih komoditas hortikultura yang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman karet untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Sementara itu, pelatihan praktik manajemen meliputi analisis siklus tanaman, pelatihan pembuatan kompos, pupuk, dan herbisida organik. Berikutnya pemanfaatan hasil produksi pertanian dan rumah tangga serta analisis pemanfaatan lahan dengan pola agroforestri yang baik.

■ ed: irwan kelana